

1. Hasil Implementasi E-KTP

Setelah melakukan pengamatan data penelitian dilapangan, peneliti menemukan beberapa hasil dari implemntasi program E-KTP yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012. Hasil ini juga merupakan bagian dari empat indikator penelitian yang menjadi variabel X Berikut ini adalah hasil dari proses Implementasi E-KTP khususnya pada proses perekaman *data base* E-KTP

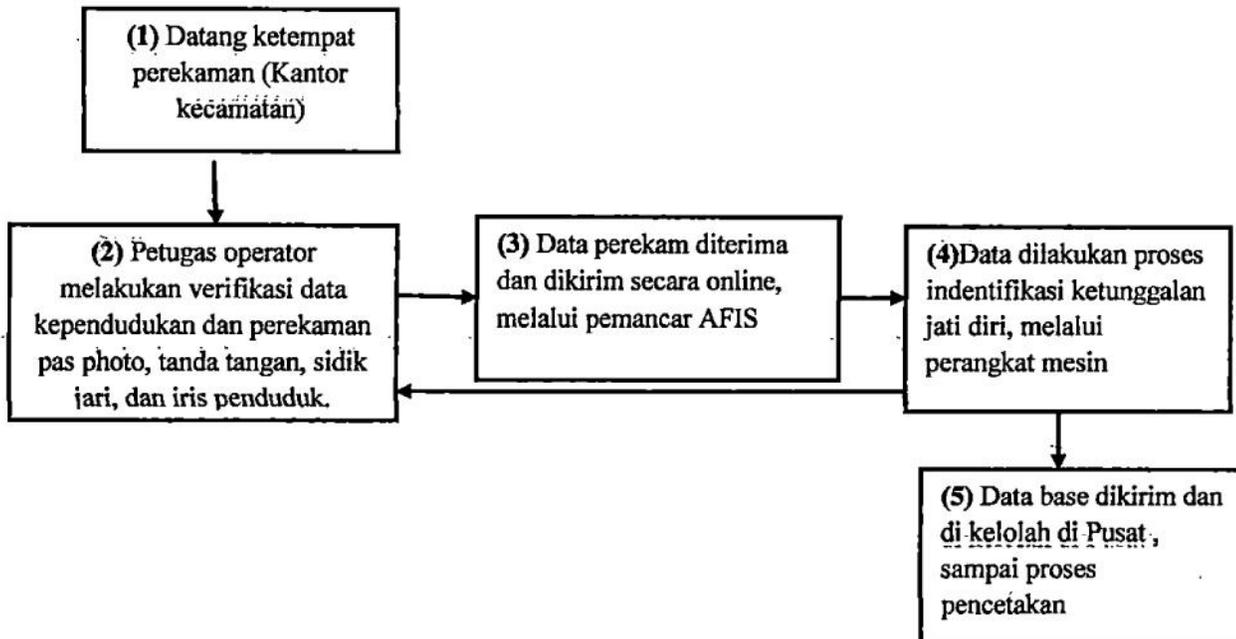
Dalam proses implementasi program E-KTP, setelah dilakukan sosialisasi proses berikutnya adalah perekaman *database* penduduk. Tahapan perekaman adalah tahapan dimana wajib KTP melakukan serangkayan proses kegiatan untuk mengumpulkan *database* dasar sebagai bahan informasi E-KTP. Berdasarkan petunjuk lapangan yang dikeluarkan kementerian dalam negeri sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2006 dan perpres No.26 tahun 2009 tentang administrasi kependudukan telah diatur tata cara penerbitan E-KTP. Berikut tata cara perekaman E-KTP.

1. Penduduk atau wajib E-KTP datang ketempat-tempat perekaman E-KTP dalam hal ini di kantor Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

2. Setelah mendaftar, peserta wajib E-KTP menunggu sampai di panggil petugas.
3. Petugas operator melakukan verifikasi data kependudukan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris penduduk di tempat pelayanan E-KTP kemudian dikirim secara online ke pusat.
4. Data yang diterima kemudian dikirim dari tempat pelayan melalui pemancar, diterima dan disimpan dalam *database* AFIS.
5. Setelah proses ini dilanjutkan kepada proses indentifikasi ketunggalan data diri melalui perangkat mesin sampai E-KTP diterbitkan.

Gambar 3.1

Tata Cara Proses Perekaman data kependudukan E-KTP



Sumber data : Sumber: Tim Pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

a. Hasil Rekapitulasi Perekaman *Data Base* E-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul sejak bulan September 2011 telah melakukan perekaman *database* wajib E-KTP. Pelaksanaan perekaman *database* sejak dimulai September sampai Desember 2011 di tiap Kecamatan hanya terlaksana kurang dari 30 % perkecamatan. Di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Srandakan

proses perekaman priode pertama sampai Desember 2011 hanya menghasilkan 19,5%.⁴¹

Lambannya proses perekaman di Kecamatan Srandakan berdasarkan hasil wawancara dikarenakan terjadi kerusakan peralatan elektronik dan perangkat E-KTP. Karena alat tidak boleh di “otak ataik” pihak Kecamatan maka alat perekam data dikirimkan kembali ke Pusat dan waktu kembali tertunda. Selain peralatan elektronik, kendala listrik pun mejadi salah satu lambannya proses perekaman.

“Ia dalam proses perekamana berlangsung, listrik sering mati dan turun naik akibatnya alat sulit bekerja, dan hal ini terjadi hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul”⁴²

Berikut ini adalah data kerusakan peralatan elektronik perangkat E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul;

⁴¹ Hasil wawancara bersama Ibu Suratini, camat Serandakann 30 Januari 2012

⁴² Ibid . 27

Tabel 3.1

Data Kerusakan Peralatan Elektronik Program E-KTP Di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Peralatan Elektronik		Jumlah
		Nama Alat	Jenis	
1.	Srandakan	Switch rusak	Keras	1
2.	Sanden	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	Lunak	
3.	Kretek	-		
4.	Pundong	-		
5.	Bb.lipuro	Ups 2200 VA, Aplikasi Perekaman Sidik Jari	Keras	2
6.	Pandak	Ups 2200 VA	Keras	2
7.	Bantul	Switch dan Cabling	Keras	1
8.	Jetis	Switch dan Cabling	Keras	1
9.	Imogiri	Hardisk server afis dan Ups 750VS	Keras	3
10.	Dlingo	-		
11.	Pleret	Ups 750 VS	Keras	1
12.	Piyungan	Iris Mata Error	Keras	2
13.	Banguntapan	-		
14.	Sewon	-		
15.	Kasihani	Iris Mata Error	Keras	1
16.	Pajangan	Server (untuk Database dan AFIS)	Keras	1
17.	Sedayu	Operating System (OS)- Windows Server	Lunak	
Jumlah				15

Sumber: Tim Pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

Bedasarkan hasil penelitian di lapangan di 17 Kecamatan se-Kabupaten Bantul, perekaman sejak bulan September 2011 sampai Juni 2012 kecamatan Pundong yang menyelesaikan target perekaman wajib E-KTP paling sedikit yaitu 70.34%. Dari target 32.955 wajib E-KTP baru tercapai 23.181 yang telah melakukan perekaman dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 9.774. Berbeda di Kecamatan Pajangan, Kecamatan ini menjadi Kecamatan yang paling cepat melakukan proses perekaman E-KTP. Di Kecamatan ini telah menyelesaikan 82.77%. Dari target 26.825 dimana telah melakukan perekaman sebanyak 22.202 wajib E.KTP dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 4.623. Walaupun Kecamatan Pajangan yang paling cepat mencapai target yang ditentukan, namun Kecamatan Banguntapan yang paling banyak melakukan perekaman atas wajib E-KTP yaitu 65.441 wajib E-KTP. Sedangkan total yang telah direkam seluruh kecamatan se-Kabupaten Bantul adalah 598,741 atau 76.67 %.⁴³ ada pun hasil lengkap perekaman E-KTP di Kecamatan se- Kabupaten Bantul sebagai berikut;

⁴³ Hasil pengolahan data Tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul 2011

Tabel.3.2
LAPORAN E KTP KABUPATEN BANTUL 2012
per TANGGAL 15 JUNI 2012

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		YANG		PROSENTAS		JUMLAH		PROSENTASE		KETERANGAN YANG TIDAK HADIR					
		JUMLAH	WAJIB KTP	WAJIB KTP	WAJIB KTP	TEREKAM	BELUM	TEREKAM	TEREKAM	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	MENINGGAL	PINDAH	GANDA	ALASAN LAIN	TOTAL
		PENDUDUK	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	S/D 15 JUNI	TEREKAM	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN
		UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN	UNDANGAN
1	DLINGO	43.275	33.383	33.383	0	25.138	8.245	75,30%		27.098	92,77%		464	196	2.142				5.922	8.724			
2	SRANDAKAN	34.677	27.078	27.078	0	21.141	5.937	78,07%		22.923	92,23%		232	3.896	27				2.224	6.379			
3	PAJANGAN	35.517	26.825	26.825	0	22.202	4.623	82,77%		25.413	87,36%		539	598	275				1.122	2.534			
4	JETIS	61.700	47.378	47.378	0	37.663	9.715	79,49%		45.640	82,52%		851	541	346				7.063	8.801			
5	PANDAK	56.536	43.521	43.521	0	34.506	9.015	79,29%		41.882	82,39%		569	1.061	9				8.012	9.651			
6	PIYUNGAN	53.454	40.029	40.029	0	31.907	8.122	79,71%		38.844	82,14%		284	503	398				6.875	8.060			
7	SEDAYU	50.459	38.364	38.364	0	29.600	8.764	77,16%		36.096	82,00%		432	1.377	459				6.514	8.782			
8	BANTUL	69.684	53.893	53.893	0	41.064	12.829	76,20%		51.358	79,96%		535	1.421	579				11.253	13.788			
9	SEWON	105.319	80.490	80.490	0	63.049	17.441	78,33%		80.207	78,51%		115	134	34				228	511			
10	KASIHAN	109.173	81.957	81.957	0	63.960	17.997	78,04%		81.526	78,45%		173	203	55				1.649	2.080			
11	IMOGIRI	68.283	53.032	53.032	0	40.710	12.322	76,76%		52.088	78,16%		376	515	53				958	1.902			
12	SANDEN	37.820	30.044	30.044	0	22.096	7.948	73,55%		28.303	78,07%		885	775	81				4.314	6.055			
13	KRETEK	34.996	27.746	27.746	0	20.767	6.979	74,85%		26.690	77,81%		335	572	149				6.651	7.707			
14	BANGUNTAPAN	114.631	86.344	86.344	0	65.441	20.903	75,79%		86.148	75,96%		102	53	41				2.784	2.980			
15	PLERET	53.718	40.739	40.739	0	29.150	11.589	71,55%		39.388	74,01%		405	629	316				11.003	12.354			
16	BAMBANGLIPURO	47.405	37.120	37.120	0	27.166	9.954	73,18%		36.718	73,99%		157	189	56				10.281	10.683			
17	PUNDONG	41.784	32.955	32.955	0	23.181	9.774	70,34%		31.348	73,95%		629	717	261				8.636	10.243			
	JUMLAH	1.018.431	780.898	780.898	0	598.741	182.157	76,67%		751.670	79,65%		7.084	13.380	5.281				95.489	121.234			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

Dari hasil pengamatan di lapangan bila dibandingkan dengan Kabupaten lain, Kabupaten Bantul memang sedikit lebih lamban dalam upaya perekaman *data base* wajib E-KTP. Dari hasil data yang telah berhasil dihimpun di atas, Kabupaten Bantul hanya dapat merekam 337,776 *data base* wajib E-KTP di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten bantul, yang artinya satu Kecamatan hanya berhasil merekam *data base* sekitar 132 wajib E-KTP perhari. Sedangkan rata-rata perbulan adalah 67.555 wajib E-KTP, di seluruh Kecamatan Kabupaten Bantul yang itu artinya satu Kecamatan hanya dapat merekam *data base* sekitar 3974 wajib E-KTP perbulan.

b. Target dan Capaian Perekaman *Data Base* E-KTP

Dalam target capaian perekaman *data base*, E-KTP di Kabupaten Bantul pada tahun 2011-2012 yang dimulai dari September 2011 sampai Juni 2012, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul menargetkan perekaman dari total 1.018.431 wajib E-KTP ditargetkan mencapai 100 % sampai waktu yang telah ditentukan oleh kementerian dalam negeri. Berikut adalah target perekaman *data base* E-KTP oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul;

Tabel 3.3

Target Perkaman Database E-KTP (Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bantul)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TEREKAM S/D 15 JUNI 2012	YANG BELUM TEREKAM	PROSENTASE SESUAI UNDANGAN	JUMLAH WAJIB KTP RIIL
1	DLINGO	25.138	8.245	75,30%	27.098
2	SRANDAKAN	21.141	5.937	78,07%	22.923
3	PAJANGAN	22.202	4.623	82,77%	25.413
4	JETIS	37.663	9.715	79,49%	45.640
5	PANDAK	34.506	9.015	79,29%	41.882
6	PIYUNGAN	31.907	8.122	79,71%	38.844
7	SEDAYU	29.600	8.764	77,16%	36.096
8	BANTUL	41.064	12.829	76,20%	51.358
9	SEWON	63.049	17.441	78,33%	80.207
10	KASIHAN	63.960	17.997	78,04%	81.526
11	IMOIRI	40.710	12.322	76,76%	52.088
12	SANDEN	22.096	7.948	73,55%	28.303
13	KRETEK	20.767	6.979	74,85%	26.690
14	BANGUNTAPAN	65.441	20.903	75,79%	86.148
15	PLERET	29.150	11.589	71,55%	39.388
16	BAMBANGLIPURO	27.166	9.954	73,18%	36.718
17	PUNDONG	23.181	9.774	70,34%	31.348
	JUMLAH	598.741	182.157	76.67%	751.670

Bila melihat hasil perekaman *data base* yang telah di rilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, jelas terlihat target yang awal dipatok ke angka 100% belum dapat direalisasi dengan baik. Melihat per Kecamatan, Kecamatan Pajangan menjadi Kecamatan yang paling baik dalam menyelesaikan target perekaman di mana 82,77 % atau 22.202 wajib E-KTP berhasil dilakukan perekaman. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit menyelesaikan target perekaman wajib KTP adalah Kecamatan Pundong dengan prosentase 70, 63 % atau 23.181.

Hal lain dari hasil perekaman diatas adalah, wajib E-KTP yang belum terekam. Ada 182.157 wajib E-KTP yang belum terekam dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul sedangkan yang telah berhasil direkam adalah 598.741 wajib E-KTP. Sedangkan Kecamatan yang paling tinggi angka yang belum melakukan perekaman E-KTP adalah Banguntapan 20.903, sedangkan Pajangan menjadi Kecamatan yang paling sedikit wajib E-KTP yang belum terekam yaitu sebanyak 4.623.

Bila melihat hasil penelitian dan beberapa data yang di input dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul capaian perekaman E-KTP di kecamatan se- Kabupaten Bantul sangat beragam sesuai banyak dan sedikitnya jumlah penduduk atau wajib E-

KTP yang akan melakukan proses perekaman berikut adalah data capaian dari hasil perekaman database E-KTP mulai tahun 2011 sampai 15 Juni 2012.

Tabel 3.4
Capaian Perekaman Database E-KTP

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TEREKAM S/D 15 JUNI 2012	YANG BELUM TEREKAM	PROSENTASE SESUAI UNDANGAN	JUMLAH WAJIB KTP RIIL	PROSENTASE RIIL (KOLOM 7/ KOLOM 10 x 100%)
1	DLINGO	25.138	8.245	75,30%	27.098	92,77%
2	SRANDAKAN	21.141	5.937	78,07%	22.923	92,23%
3	PAJANGAN	22.202	4.623	82,77%	25.413	87,36%
4	JETIS	37.663	9.715	79,49%	45.640	82,52%
5	PANDAK	34.506	9.015	79,29%	41.882	82,39%
6	PIYUNGAN	31.907	8.122	79,71%	38.844	82,14%
7	SEDAYU	29.600	8.764	77,16%	36.096	82,00%
8	BANTUL	41.064	12.829	76,20%	51.358	79,96%
9	SEWON	63.049	17.441	78,33%	80.207	78,61%
10	KASIHAN	63.960	17.997	78,04%	81.526	78,45%
11	IMOGIRI	40.710	12.322	76,76%	52.088	78,16%
12	SANDEN	22.096	7.948	73,55%	28.303	78,07%
13	KRETEK	20.767	6.979	74,85%	26.690	77,81%
14	BANGUNTAPAN	65.441	20.903	75,79%	86.148	75,96%
15	PLERET	29.150	11.589	71,55%	39.388	74,01%
16	BAMBANGLIPURO	27.166	9.954	73,18%	36.718	73,99%
17	PUNDONG	23.181	9.774	70,34%	31.348	73,95%
	JUMLAH	598.741	182.157	76,67%	751.670	79,65%

Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul 2012.

Capaian perekaman E-KTP Kecamatan se-Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 sampai dengan tahun telah mencapai 598.741 atau 79,65 %. Capaian ini tentunya cukup baik dikarenakan ada beberapa kendala yang cukup berat seperti kerusakan alat perekaman. Capaian yang awalnya ditargetkan 100% dapat terekam ternyata hanya dapat di realisasi pada angka 79,65% saja artinya masih sekitar 20,35 % yang belum di lakukan proses perekaman *database*. Bila di lihat dari perolehan capaian ini terlihat ada beberapa kecamatan yang mampu mengefektifkan semua komponen untuk menjalankan program E-KTP ini. Seperti Kecamatan Banguntapan walaupun jumlah wajib E-KTP paling banyak 86.148, dengan tim penanggung jawab dan tim teknis E-KTP kecamatan yang sedikit namun dapat menyelesaikan 75,96 % wajib E-KTP atau 65.441.

“ Ia Kecamatan Banguntapan yang jumlah wajib E-KTP nya paling banyak ternyata mampu melakukan pekerjaan dengan baik dimana tim ini berhasil merekam sekitar 65.411 wajib E-KTP, ini hal yang sangat positif”⁴⁴

Dari klise data di atas setidaknya terlihat beberapa fenomena menarik dari proses melaksanakan program E-KTP ini. Bila melihat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam merealisasi Program Nasional EKTP ini tidak terlalu “mentereng” artinya dalam 100%

⁴⁴ *ibid*

target ternyata hanya dapat direalisasi 79,65% ini dapat menunjukkan kinerjanya biasa-biasa saja.

Dari hasil pengolahan data dan penelitian dilapangan serta laporan dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul, dalam proses implementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012 tidak luput dari kendala-kendala khususnya didalam proses perekaman. Salah satu kendala tersebut adalah masyarakat yang belum melakukan perekaman *data base* E-KTP walaupun telah di undang dan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul. Adapun penyebabnya untuk saat ini adalah masyarakat atau wajib E-KTP melakukan pinda jiwa dan belum melapor secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, ada juga masyarakat atau wajib E-KTP yang meninggal dunia, ada juga sengaja atau belum sempat melakukan proses perekaman E-KTP nya, berikut adalah data hasil dari masyarakat atau wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman *data base* yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

Tabel 3.5

Jumlah Wajib E-KTP Yang Belum Melakukan Perekaman *Database*

NO.	KECAMATAN	YANG BELUM TEREKAM	KETERANGAN YANG TIDAK HADIR				TOTAL
			MENINGGAL	PINDAH	GANDA	ALASAN LAIN (RINCIAN TERLAMPIR)	
1	DLINGO	8.245	464	196	2.142	5.922	8.724
2	SRANDAKAN	5.937	232	3.896	27	2.224	6.379
3	PAJANGAN	4.623	539	598	275	1.122	2.534
4	JETIS	9.715	851	541	346	7.063	8.801
5	PANDAK	9.015	569	1.061	9	8.012	9.651
6	PIYUNGAN	8.122	284	503	398	6.875	8.060
7	SEDAYU	8.764	432	1.377	459	6.514	8.782
8	BANTUL	12.829	535	1.421	579	11.253	13.788
9	SEWON	17.441	115	134	34	228	511
10	KASIHAN	17.997	173	203	55	1.649	2.080
11	IMOGIRI	12.322	376	515	53	958	1.902
12	SANDEN	7.948	885	775	81	4.314	6.055
13	KRETEK	6.979	335	572	149	6.651	7.707
14	BANGUNTAPAN	20.903	102	53	41	2.784	2.980
15	PLERET	11.589	406	629	316	11.003	12.354
16	BAMBANGLIPURO	9.954	157	189	56	10.281	10.683
17	PUNDONG	9.774	629	717	261	8.636	10.243
	JUMLAH	182.157	7.084	13.380	5.281	95.489	121.234

Jumlah wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman di kecamatan se-Kabupaten Bantul bila melihat hasil data sapaai 15 Juni 2012 tergolong cukup tinggi dimana total ada 182.157 wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman. Alasan atau faktor penyebab belum melakukan perekaman adalah, meninggal dunia, pindah, ganda dan alasan lain yang belum diketahui. Kecamatan yang paling banyak wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman berada di Kecamatan Banguntapan sebesar 20.903, sedangkan kecamatan yang paling sedikit masyarakat atau warganya yang belum melakukan perekaman E-KTP adalah di Kecamatan Pajangan sekitar 4.623 .

Faktor yang paling dominan mengapa masyarakat belum melakukan perekaman *data base* adalah pindah jiwa, masyarakat yang melakukan pindah jiwa yang belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menjadi faktor utama mengapa wajib E-KTP belum melakukan perekaman. Hal ini menyumbang sekitar 13.380 wajib E-KTP. Sedangkan meninggal sebanyak 7.084 jiwa. Faktor KTP ganda juga menjadi penghambat belum maksimalnya perekaman. Warga yang memiliki KTP ganda tidak atau belum bisa dilakukan perekaman, jumlah wajib E-KTP yang belum memiliki KTP ganda pada 17 Kecamatan Se-Kabupaten Bantul adalah 5.281.

Namun yang paling banyak menjadi penyumbang belum tercapainya target E-KTP adalah hal lain yang termasuk kedalam kesadaran masyarakat, apatisme warga serta minimnya informasi tentang pentingnya E-KTP. Warga Kabupaten Bantul yang belum melakukan perekaman *data base* dikarenakan alasan diatas berjumlah 95.489 jiwa.

“ya, warga yang belum melakukan perekaman data base E-KTP di Kabupaten Bantul tergolong cukup besar; hal ini disebabkan banyak warga yang pindah jiwa tapi tidak melapor ke kami, kemudian ada yang meninggal, ada juga yang memiliki KTP ganda sehingga tidak dapat diproses serta kesadaran masyarakat yang masih kurang peka pentingnya program ini”⁴⁵

Bila dilihat dari Kecamatan, ada beberapa Kecamatan yang paling banyak warganya yang belum melakukan perekaman *data base* seperti Kecamatan Banguntapan, Sewon, Jetis dan Bantul Kecamatan ini menyumbang diatas 17 ribu warga yang belum melakukan perekaman. Kecamatan yang paling besar adalah Banguntapan 20.903 sedangkan yang paling sedikit adalah Pajangan sekitar 4.634.

⁴⁵ Ibid. *Op. Cit*

B. Indikator Implementasi E-KTP

Dalam proses implementasi program E-KTP ini, dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan yang pertama bagaimana komunikasi dimainkan dalam upaya sosialisasi program ini, sumber daya yang menjadi unsur pelaksana dan bahan utama, sikap pelaksana yang difungsikan sebagai panduan operasional teknis serta struktur birokrasi yang sama pentingnya dengan indikator-indikator lainnya. Untuk mengupayakan agar sosialisasi E-KTP berjalan dengan baik Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul melakukan beberapa cara komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga memanfaatkan beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Berikut langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul agar masyarakat Bantul mendapat informasi yang baik terkait proses program Nasional E-KTP.

1. Komunikasi

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi serta tim penanggung jawab program E-KTP adalah Pemerintah pusat melalui kementrian dalam Negeri selaku penyelenggara program E-KTP kemudian turun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dimana

di wakili oleh Bupati Bantul sebagai pihak penanggung jawab utama, Berikutnya turun kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai unsur pelaksana program, dalam penerapannya agar lebih efektif kemudian dibentuk kembali satu tim yaitu tim pelaksana dan penanggung jawab program E-KTP yang terdiri dari mahasiswa AKAKOM Yogyakarta selaku tim teknis, pihak Kecamatan se Kabupaten Bantul selaku tim teknis serta perangkat Desa dan Pedukuhan selaku tim pendukung sosialisasi dan kemudian disosialisasikan kepada wajib E-KTP atau masyarakat diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.

Cara komunikasi dalam tahapan sosialisasi yang diberikan Kementrian dalam Negeri terhadap pelaksana E-KTP yang terdiri dari Bupati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tim penanggung jawab E-KTP adalah dengan melakukan Seminar dan pelatihan serta pengarahan dan teknis lapangan, yang bertujuan agar dalam pelaksanaan program E-KTP dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi yang kemudian masuk dalam tahapan sosialisai merupakan fase yang penting dalam sebuah pelaksanaan program kerja. Tahapan sosialisai biasanya bertujuan agar objek dan subjek satu program dipahami secara jelas apa saja sebenarnya bentuk, cara, dan hal lain dari program itu sendiri. Dalam tahapan sosialisasi

komunikasi adalah salah satu elemnt yang menjadi modal utama, baik komunikasi secara langsung, *face to face* maupun komunikasi melalui media masa atau iklan publik. Berikut komunikasi yang di lakukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul serta tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul guna menginformasikan program E-KTP.

a. Komunikasi Melalui Media masa.

Sebagai upaya efektifitas implemnetasi program E-KTP dalam hal ini adalah sosialisasi program E-KTP dan proses perekaman *data base* kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul melakukan komunikasi dan sosialisasi melalui massa. Adapun media yang digunakan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul adalah radio , koran dan majalah. Radio dipilih karena hampir 56 % penduduk Kabupaten Bantul dapat mengakses siaran radio dimana saja. Selain itu juga radio dianggap media yang relatif murah dari segi iklan dan promosi.

“Berdasarkan intruksi dari bapak kepala dinas kami harus segera mengkomunikasikan serta mensosialisasikan program ini dengan berbagai media massa baik radio, koran maupun televisi”⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Emmy Nikmawati, SH kepala sub bagian program “Berdasarkan intruksi dari bapak kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul kami harus segerah mengkomunikasikan serta mensosialisasikan program ini” tanggal 23 Januari 2012.

Selain radio media masa cetak pun menjadi tempat yang penting untuk mengupayakan komunikasi dalam implementasi E-KTP. Koran dan majalah menjadi media yang dipakai koran Kaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Bernas, Radar Jogja, Majalah Bantul yang telah dipakai untuk membantu dalam menginformasikan Program E-KTP Berikut media massa yang dipakai dalam upaya mengkomunikasikan Program E-KTP:⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Dra. Arif Nurlaela Kepala pengolahan data dan informasi tanggal 23 Januari 2012

Tabel 3.6**Media Massa Yang Dipakai Dalam Komunikasi Dan Sosialisasi Program E-KTP**

No	Nama Media Massa	Jenis	Acara/Rubrik	Volume
1	Kedaulatan Rakyat	Cetak	Umum	3 x / minggu
2	Tribunjogja	Cetak	Umum	5 x/ minggu
3	Bantul Radio FM 89,1	Elektronik	Bantul Projetaman sari	2 x /Minggu
4	Radio Prima Jogja FM 91,9	Elektronik	Berita umum	
5	Radio Persatuan Bantul FM 94,2	Elektronik	Berita umum	1 x /Minggu
6	Megaswara FM 93,8	Elektronik	Berita umum	Tidak tetap
7	I Radio FM 88,7	Elektronik	Berita umum	Tidak tetap
8	Bernas	Cetak	Umum	
9	Majalah Bantul projotaman sari	Cetak	Umum	1 edisi

Sumber : data diolah dari kepala seksi pengolahan data dan informasi

b. Komunikasi melalui media iklan

Sosialisasi dan komunikasi program E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul bermacam dan sangat bervariasi. Selain menggunakan media masa juga menggunakan media iklan seperti spanduk, baleho, iklan selebaran dan lain-lain. Media visual ini dianggap penting dan efektif. Media iklan ini bisaanya di letakkan di tempat-tempat strategis seperti

perempatan jalan, puskesmas, kantor pemerintah dan tiap kantor kecamatan dan kelurahan sampai pedukuhan. (*Dari hasil wawancara bersama kepala bagian program Emmy Nikmawati, SH*) tiap Kecamatan dan kantor Kelurahan telah diletakkan atau disebar pemberitahuan baik selebaran maupun spanduk yang isinya ajakan bagi penduduk Kabupaten Bantul untuk segera melakukan proses perekaman *database* kependudukan guna “menyuport” program E-KTP.

c. Komunikasi melalui perangkat desa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai keputusan Bupati Bantul No 17 tahun 2012 tentang pembentukan tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul diberi mandat untuk melaksanakan program ini. Guna mengkomunikasikan program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan komunikasi dan sosialisasi ditingkat pemerintah paling bawah yaitu desa.

Desa atau pedukuhan dilibatkan dalam proses komunikasi perekaman E-KTP ini.

“Kami telah mengundang seluruh kepala desa, lurah, ketua dukuh, RW dan RT bahkan Ormas dan Lsm untuk berperan

aktif mengkomunikasikan program ini agar proses perekaman database e-KTP ini cepat terlaksana”⁴⁸

Sebelumnya di tingkat Kecamatan sudah dilaksanakan komunikasi dan sosialisasi secara bergiliran dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Bantul semua sudah terlaksana dan berjalan lancar walaupun hasilnya belum maksimal. Dimulai dari Kecamatan Jetis sampai yang terakhir Sedayu.

Komunikasi dan sosialisasi ini dilaksana berupa pertemuan sarahsehan antar pengurus desa dan pedukuhan. Penyuluhan juga dimaksudkan agar perangkat desa dapat menjelaskan kepada penduduk untuk segera melakukan proses perekaman *database* E-KTP mengingat hal ini sangat penting. Komunikasi antar staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan pengurus desa atau pedukuhan berjalan dengan baik. Antara staf dan pengurus desa dan pedukuhan saling mendukung satu-sama lain⁴⁹, berikut jadwal sosialisasi E-KTP di Kabupaten Bantul;

⁴⁸ Ibid. 2

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Tri sumiarti,SH anggota Tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

Tabel 3.7**Jadwal Sosialisasi Program E-KTP di Kecamatan Se-Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jadwal Sosialisasi		Volume
		Tanggal	Lokasi	
1.	Srandakan	2 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
2.	Sanden	3 Juli 2011	Balai kelurahan Sanden	2
3.	Kretek	5 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
4.	Pundong	6 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
5.	Bb.lipuro	7 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
6.	Pandak	9 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
7.	Bantul	12 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
8.	Jetis	14 Juli 2011	Kelurahan Jetis	1
9.	Imogiri	2 Agustus 2011	Balai Kecamatan	1
10.	Dlingo	17 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
11.	Pleret	21 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
12.	Piyungan	23 Juli 2011	Kelurahan Piyungan	2
13.	Banguntapan	25 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
14.	Sewon	26 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
15.	Kasih	27 Juli 2011	Balai Kecamatan	2
16.	Pajangan	1 Agustus 2011	Kelurahan Pajangan	1
17.	Sedayu	28 Juli 2011	Balai Kecamatan	1
Jumlah				25

Sumber: Tim Pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

d. Komunikasi antar tim pelaksana E-KTP

Komunikasi antar tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul telah dilakukan. Adapun proses komunikasi tersebut adalah, kepala Dinas setelah mendapat tugas dari Ketua pelaksana E-KTP dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Bantul meneruskan komunikasi kepada tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul, setelah itu tim ini melakukan komunikasi kepada pihak ketiga dalam hal ini media massa serta tim pembantu yaitu mahasiswa AKAKOM Yogyakarta yang telah terbentuk.

Setelah dilakukan komunikasi, tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul mensosialisasi cara teknis yang akan dilakukan dalam proses implementasi program E-KTP. Komunikasi yang dibangun antar lini dalam tim teknis ini berjalan dengan baik. Pemahaman seluruh aparat dan Tim pelaksana proses pelayanan E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul terhadap informasi pelayanan pun sangat baik, antara tim teknis dengan tim teknis lain saling mengetahui informasi bagaimana proses pelayanan

program E-KTP dilakukan. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dilakukan dalam hal pengetahuan informasi pelayanan menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan secara rata rata baik. Berikut hasil jawaban responden terkait hal tersebut.

Table 3.8
Pengetahuan Tim pelaksana proses pelayanan e-KTP di Kecamatan se-
Kabupaten Bantul terhadap informasi pelayanan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	8	32
2.	Baik	10	40
3.	Kurang baik	4	16
4.	Tidak baik	3	12
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil penelitian

Komunikasi yang dilakukan antar lini telah berjalan dengan baik, dalam hal ini adalah informasi pelayanan dari 25 responden yang menyatakan informasi pelayanan sangat baik adalah 32 %, baik 40 %, 16 % kurang baik, dan sisanya 12% tidak baik, menjawab tidak baik dikarenakan program E-KTP merupakan program baru yang diterapkan oleh pemerintah Pusat sehingga membuat sebagian

pegawai tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap program E-KTP sehingga membutuhkan waktu untuk memahami secara keseluruhan dari program tersebut.

Begitu juga dengan aparat pelaksana dan tim pelayanan e-KTP terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berjalan baik. Komunikasi yang dilakukan masing-masing tim dalam upaya tugas dan tanggung jawab masing-masing dipahami dengan baik berikut hasil jawaban responden terkait hal tersebut

Table 3.9
Pengetahuan Tim pelaksana E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul terhadap upaya tugas dan tanggung jawab

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	3	12
2.	Baik	18	72
3.	Kurang baik	2	8
4.	Tidak baik	2	8
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil penelitian

Dari hasil kuesioner diatas menunjukan sebagian besar atau 72% responden mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang

dikomunikasikan antar tim pelaksanaan program E-KTP berjalan dengan baik, diikuti Kurang baik 8 % sangat Baik 12% serta tidak baik 8%. Menjawab tidak baik dikarenakan masih kurangnya pengetahuan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dari aspek alur komunikasi yang dilakukan antar tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul telah berjalan sesuai koridor atau alur komunikasi yang efektif, berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar responden mengatakan alur komunikasi dalam implementasi program E-KTP sudah berjalan dengan baik.

Table 3.10
Pengetahuan Tim Pelaksana e-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul Terhadap Alur Komunikasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	1	4
2.	Baik	15	60
3.	Kurang baik	7	28
4.	Tidak baik	2	8
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil penelitian

Dari hasil kuesioner yang telah ada menunjukkan bahwa alur komunikasi yang diterapkan atau dipakai dalam upaya mengimplementasikan program nasional E-KTP telah berjalan sesuai alur yang benar. Sebagian besar responden mengatakan alur komunikasi yang dijalankan baik sebanyak 60 %, kemudian kurang baik 28% , tidak baik 8% dan 4 % sangat baik. Mengatakan sangat baik dikarenakan dalam proses komunikasi antara tim 1 dengan tim yang lainnya telah berjalan dengan sangat baik dalam artian telah sesuai dengan jalur yang benar baik dari level atas kebawah maupun level bawah ke atas. Kondisi ini setidaknya telah dapat menggambarkan bahwa komunikasi yang dijanjikan antar lini tim telah berjalan dengan baik.

Dari aspek komunikasi antara tim pelaksana proses E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul dengan masyarakat Kabupaten Bantul berjalan baik. Mengacu pada hasil kuesioner sebagian besar responden menjawab komunikasi antara tim pelaksana dengan masyarakat Kabupaten Bantul dalam upaya sosialisasi program dan perekaman *database* E-KTP berjalan baik.

Table 3.11
Komunikasi Tim Pelaksana E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul
Dengan Masyarakat Kabupaten Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	2	8
2.	Baik	19	76
3.	Kurang baik	3	12
4.	Tidak baik	1	4
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil penelitian

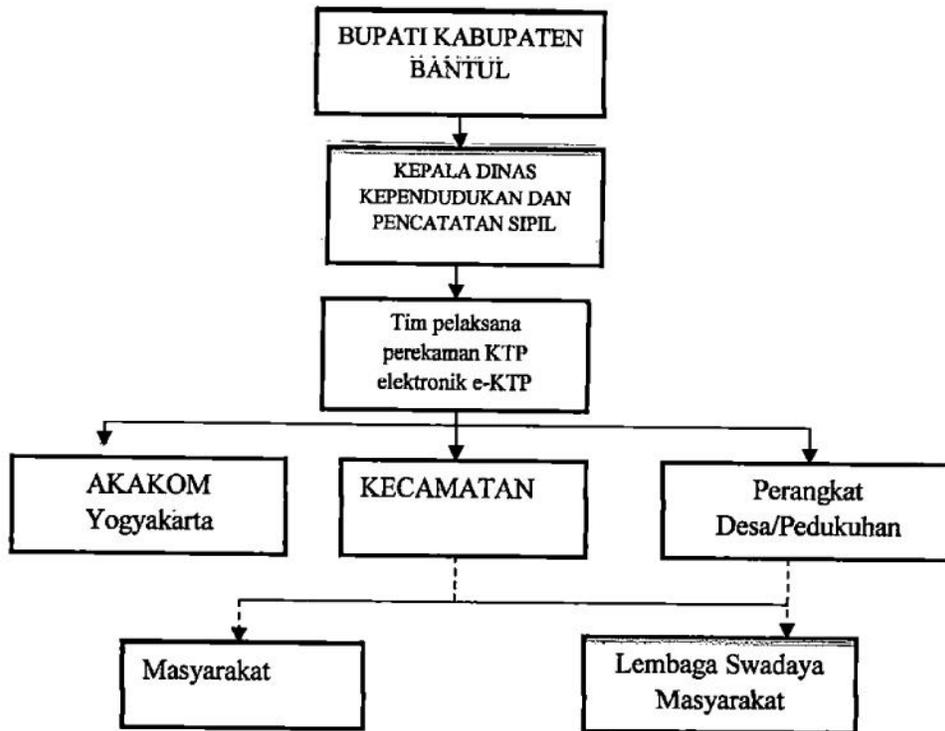
Dari hasil kuesioner ini di dapatkan bahwa, 76 % responden mengatakan komunikasi yang dilakukan tim pelaksana program E-KTP dengan masyarakat di Kabupaten Bantul dalam upaya mensosialisasikan program ini adalah baik. 12% mengatakan kurang baik, 8% sangat baik dan sisanya 4% tidak baik. menjawab tidak baik dikarenakan kurang maksimalnya proses sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung dikarenakan minimnya waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat mengenai waktu mengenai sosialisasi sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui arti penting dari program E-KTP.

Komunikasi juga merupakan satu hal yang sangat penting dari proses implementasi suatu program agar berjalan efektif dan efisien. Selain itu komunikasi juga dapat diwujudkan dengan adanya sebuah koordinasi atau sistem kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kebijakan dengan adanya koordinasi dan kerjasama maka sistem yang dibangun akan lebih selaras.

Dalam pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Bantul sosialisasi dan komunikasi efektif menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya program E-KTP. Mengingat waktu yang diberikan dalam mengsucceskan program ini cukup singkat maka dari hasil yang didapat oleh tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP, Kabupaten Bantul sebanyak 598.741 wajib E-KTP yang terekam dari target jumlah wajib E-KTP sesuai undangan sebanyak 780.898. Dapat diasumsikan bahwa salah satu keberhasilannya adalah komunikasi yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP, Kabupaten Bantul dalam upaya menginformasikan dan mensosialisasikan program E-KTP di Kabupaten Bantul. Salah satu contoh bentuk komunikasi yang terjadi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul dapat terlihat dari bagan di bawah ini;

Gambar 3.2

Alur Komunikasi Tim Pelaksanaan Program E-KTP Kabupaten Bantul 2011



(Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP, Kabupaten Bantul)

Komunikasi dan koordinasi di mulai dari keputusan Bupati Bantul No 17 tahun 2012 tentang pembentukan tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul yang kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah dibentuk tim

teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP baru dimulai melakukan program E-KTP.

Teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP mengintruksikan pihak Kecamatan se-Kabupaten Bantul untuk menyiapkan berbagai persiapan karena proses perekaman di lakukan di Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Komunikasi dilanjut dari pihak kecamatan ke pihak masyarakat dan LSM, sampai pada akhirnya komunikasi ini berjalan dengan baik.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dilapangan komunikasi yang dibangun antar lini berjalan pada trek dan koridor yang benar. Misalnya komunikasi Bupati Bantul selaku ketua dan penanggung jawab program E-KTP ini berjalan efektif dan efisien hal ini terlihat dari kelancaran satu koordinasi yang tidak berbelit-belit dan langsung dapat direspon dan dijawab oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil dengan membentuk suatu tim pelaksanaan program ini. Komunikasi dari kepala Dinas kepada tim pelaksanaan dan tanggung jawab teknis pun berjalan seirama, petunjuk teknis yang di komunikasikan berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu hal yang menjadi hambatan , walaupun ada kekurangan di beberapa tahapan dalam proses komunikasinya.

Komunikasi yang berjalan di tingkat kecamatan pun berjalan cukup baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode pendekatan fungsional dalam artian ditraining satu per satu tim teknis Kecamatan untuk dapat memahami program E-KTP ini. Komunikasi di pihak AKAKOM Yogyakarta juga hampir sama dimana mahasiswa telah dikomunikasikan apa saja yang menjadi jobdesnya mereka dimana batasan serta apa yang harus mereka kerjakan.

“ Komunikasi yang kita bangun ke beberapa pihak sudah efektif dan efisien, hal ini terlihat tim teknis di tingkat kecamatan dan adik-adik mahasiswa tidak lagi tidak mengerti atas program E-TKP ini, namun harus diakui masih ada kekurangan karena terkendala sumber daya manusia yang minim”

Komunikasi ditingkat masyarakat juga berjalan dengan baik dengan metode komunikasi personal. Tim sosialisasi dan komunikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melakukan komunikasi dengan masyarakat bantul secara langsung *door to door*. Bila melihat efektifitas dan minat masyarakat Bantul untuk melakukan perekaman *database* sangat antusias dan komunikasi berjalan dengan baik.

Yogyakarta untuk menjadi bagian dari Tim. Jumlah sumber daya manusia yang berasal dari AKAKOM Yogyakarta sebanyak 58 mahasiswa.

Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana teknis dari tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul tentunya dalam keadaan siap bekerja. Namun secara teknis pemahaman dan pengalaman SDM dari tim ini memang relatif rendah karena program ini merupakan program baru. Selain itu waktu pelatihan juga sangat minim apalagi banyak staf yang masih kurang menguasai program-program komputer yang sangat rumit.

Dari mahasiswa AKAKOM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sengaja melibatkan mereka dalam kerja sama program E-KTP ini. Hasil seleksi mahasiswa ini sudah dilakukan secara selektif, mahasiswa yang ikut rata-rata telah menguasai program komputer, serta sistem informasi dan jaringan komputer. Kebetulan mahasiswa yang kami pilih dari jurusan IT. Berikut daftar sumber daya manusia tim pelaksana perekaman database program E-KTP.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.op.cit* 3

Tabel 3.12
Daftar Sumber Daya Manusia Tim Pelaksana Perekaman *Data Base* Program E-KTP

No	Instansi	Posisi	Jumlah	Ket
1	Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul	Operator IT	4	Setiap Kecamatan se Kabupaten Bantul
		Operator pendaftaran	1	Setiap kecamatan
		Operator Verifikasi Data	1	Setiap Kecamatan
2	AKAKOM Yogyakarta	Operator IT	1	Setiap Kecamatan
		Operator Aplikasi	1	Setiap Kecamatan
		Ahli elektronika	1	Satu Tim
Jumlah Keseluruhan se-Kecamatan Kabupaten Bantul			116	

Sumber : Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah menjadi faktor pendukung. Menjalankan sebuah kebijakan dan program tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan bahkan sangat

penting karena sumber daya manusia pada dasarnya adalah penggerak utama dari sebuah program kerja. Dalam menukung terlaksananya program E-KTP di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012 sumber daya manusia sudah barang tentu menjadi kunci suksesnya program ini. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara bersama tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 116 yang terbagi dari 58 pegawai negeri sipil (PNS) dari kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan 58 mahasiswa dari AKAKOM Yogyakarta.

Hasil temuan peneliti berkaitan dengan sumber daya manusia pada program E-KTP di Kabupaten Bantul sangat baik dan mempunyai dan memiliki keahlian yang cukup merata disetiap lini. Satu contoh kongkrit saat terjadi kerusakan alat perekam dan antisipasi kekurangan waktu kerja. Disaat itu pegawai atau sumber daya manusia rela untuk kerja lembur di luar jam kerja biasanya serta mahasiswapun bekerja keras demi terlaksananya program ini. Selain itu pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memilih dan menseleksi pegawai yang memang benar-benar terlatih dan

menguasai “skill” yang khusus di bidangnya masing masing. Penempatan posisi sumber daya manusia atau pegawainya juga sudah sangat tetap.

*”Kami salut dan bangga kepada semua pegawai baik dari tim maupun dari adik-adik mahasiswa yang rela bekerja keras (lembur) demi terlaksananya program ini tepat pada waktunya”.*⁵¹

Sumber daya manusia dalam upaya pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Bantul juga ditempatkan pada posisi yang baik. Dalam menunjang kegiatan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana melakukan proses-proses administrasi yang baik serta dibekali dengan skill informasi dan teknologi (IT) yang telah baik dari pihak kementerian dalam Negeri dan pihak kampus AKAKOM Yogyakarta.

b. Sumber Daya Material

Sumber daya material disini adalah peralatan elektronik atau alat perekaman E-KTP. Alat elektronik yang digunakan dalam proses perekaman *database* E-KTP adalah satu set perangkat komputer, satu set alat perekam pas photo (kamera),

⁵¹ Ibid.6

satu set perekam sidik jari, satu set iris mata, satu set alat pemancar.

Peralatan elektronik perekam E-KTP di Kecamatan se Kabupaten Bantul di bagi secara rata dan dalam kondisi baik dan dapat beroperasi. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa peralatan elektronik rusak dan tidak beroperasi seperti Kecamatan Srandakan, Sedayu dan Piyungan. Di kecamatan Srandakan terjadi kerusakan di alat perekam sidik jari, di Sedayu kerusakan di alat perekam iris mata dan di Piyungan tidak beroperasinya alat sidik jari. Berikut Alat perekam yang dipakai di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bantul;

Tabel.3.13

Alat Perekaman E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

No	Nama Alat	Jenis	Jumlah		Total Unit
			Volume		
1	Server (untuk Database dan AFIS)	Perangkat keras	1	47	47
2	UPS 2200VA	Perangkat keras	1	47	47
3	Decktop PC	Perangkat keras	2	47	94
4	UPS 1000VA	Perangkat keras	2	47	94
5	Harddisk Eksternal (backup data)	Perangkat keras	1	47	47
6	Switch dan Cabling	Perangkat keras	1	47	47
7	Fingerprint Scanner	Perangkat keras	2	47	94
8	Smartcard Reader/Writer	Perangkat keras	2	47	94
9	Signature Pad	Perangkat keras	2	47	94
10	Digital Scanner / Retina	Perangkat keras	1	47	47
11	Camera Digital/Web Camera	Perangkat keras	2	47	94
12	Tripod	Perangkat keras	2	47	94
13	Operating System (OS)- Windows Server	Perangkat lunak	-	-	-
14	Database Engine (Standard Edition per 5 User)	Perangkat lunak	-	-	-
15	Aplikasi Perekaman Sidik Jari	Perangkat lunak	-	-	-
16	Anti Virus Client	Perangkat lunak	-	-	-
17	Anti Virus Server	Perangkat lunak	-	-	-

Sumber : Diolah dari : <http://www.e-ktp.com> ,Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul.

Dalam tahapan proses perekaman E-KTP di Kabupaten Bantul 2011-2012 berdasarkan pengamatan dilapangan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul serta hasil

wawancara ternyata mengalami kendala baik kendala sumber daya teknologi, sumber daya material maupun sumber daya manusia seperti dibawah ini:

a. Kerusakan Alat Perekam (Teknologi)

Faktor penghambat dari program E-KTP khusus dalam tahap perekaman *database* wajib KTP datang dari peralatan perekaman. Seperti di kabupaten kota lainnya, Kabupaten Bantul juga mengalami kendala kerusakan pada alat perekam E-KTP. Di kecamatan Srandakan alat Switche penghubung tidak berfungsi atau rusak sehingga harus dikembalikan ke pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri (kemendagri).

"Saat melakukan proses perekaman E-KTP di kecamatan Srandakan alat Switche tidak berfungsi sehingga proses perekaman di tunda, kami telah berusaha secepat mungkin tapi karena alat tidak dapat di otak-atik oleh tim akhirnya kami Cuma dapat menunggu".⁵²

Di Kecamatan Bambanglipuro juga terjadi kerusakan alat yaitu Ups 100 VA 1, sedangkan di Kecamatan Pandak terjadi kerusakan Ups 750 VA sebanyak 2 unit. Berbeda di Kecamatan Pajangan kerusakan berada pada Server VGA, dan tampilan nya tidak jelas. Lain lagi di Kecamatan Piyungan dan

⁵² Ibid.

Kasihani terjadi kerusakan pada alat Iris mata. Dan di Imogiri terjadi kerusakan Hardisk server AFIS. AFIS tidak dapat membaca perekaman dan error.

“Peralatan yang rusak dan error kami kembalikan kepusat karena aturannya alat ini tidak dapat diotak-atik oleh pihak manapun selain kementerian daalm negeri”⁵³

b. Kerusakan Sistem Kelistrikan.

Selain peralatan teknologi yang rusak, yang menjadi kendala lain adalah sistem kelistrikan. Dalam proses perekaman daya listrik sering turun-naik tidak setabil yang mengakibatkan sistem perangkat perekam berkerja tidak maksimal dan terjadi kerusakan pada alat perekam E-KTP.

Di beberapa Kecamatan seperti Kasihan, Piyungan, Imogiri dan kecamatan lainnya sering terjadi pemadaman listrik yang secara otomatis mengganggu aktivitas perekaman. Pemadaman listrik itu sendiri tidak diketahui sebab musababnya. Pemadaman pun bervariasi dengan durasi yang tidak menentu, pemadaman listrik terjadi 3-5 jam.

“Bukan hanya listrik yang tidak stabil, tapi pemadaman listrik pun sering terjadi di kecamatan Kasihan, Piyungan, Pandak yang paling sering terjadi”⁵⁴

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. *Op.Cit*

c. Alokasi Waktu Pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP, Kabupaten Bantul pendeknya waktu yang diberikan juga menjadi faktor penghambat bagi implementasi program E-KTP. Dimulai sejak September 2011 sampai akhir bulan Maret 2012 di rasa waktu yang sangat pendek. Waktu sosialisasi yang diberikan oleh kementrian dalam negeri (kemendagri) selama 60 hari. Sedangkan waktu perekaman di berikan waktu 180 hari kerja di potong masa libur dan tanggal libur Nasional.

Munduranya pengerjaan program ini lebih karena lambannya perbaikan alat perekam yang rusak karena alat yang rusak dikirim kepusat yang memakan waktu 7-10 hari sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia.

“Minimnya waktu pelaksanaan memang menjadi kendala tersendiri, waktu banyak terbuang sia-sia karena lambannya perbaikan peralatan, namun telah kami atasi dengan jam lembur dan pengajuan penambahan abang batas waktu ke pihak Kabupaten Bantul dan kemudian di teruskan ke kementrian dalam negeri”⁵⁵

⁵⁵ Ibid.5

d. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat.

Selain kendala yang telah dijabarkan diatas, baik teknis dan non teknis pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan program E-KTP serta ke disiplin masyarakat menjadi faktor penghambat. Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih belum mengetahui program E-KTP ini. Di Kecamatan Pajangan misalnya, pada perekaman bulan September tidak ada masyarakat yang melakukan perekaman, padahal di kecamatan Piyungan telah 1,118 wajib E-KTP yang merekam *database* mereka.

Sama halnya di Srandakan, sejak dua bulan dilakukan perekaman baru 306 wajib e-KTP yang melakukan perekaman. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP, Kabupaten Bantul keterlambatan ini bisa jadi dikarenakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas manfaat program ini belum sepenuhnya mengerti.

“Kami berasumsi lambannya proses perekaman di beberapa Kecamatan khususnya kecamatan yang lokasinya sedikit di pinggiran, selain faktor teknis kemungkinan pemahaman masyarakat pentingnya program ini masih sangat rendah”⁵⁶

3. Sikap Pelaksana

Pelaksanaan program E-KTP dalam hal ini adalah proses perekaman E-KTP di Kabupaten Bantul setidaknya dalam penelitian ini berjalan dengan cukup baik. Sikap pelaksanaan perekaman E-KTP yang dilakukan oleh Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul berjalan berdasarkan payung hukum yang ada. Selain itu pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi tim ini sendiri. Petunjuk lapangan telah diterapkan sehingga sikap pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis dan lapangan.

Sikap pelaksanaan program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah pihak kementerian dalam negeri (Kemendagri). Dukungan yang di berikan pihak kementrian dalam Negeri adalah dengan melakukan seminar dan pelatihan. Serta adanya peran Bupati Bantul selaku penanggung jawab utama dari program E-

⁵⁶ Hasil wawancara bersama bapak Didik Koeswandono, s.sos, kepala pendaftaran Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP, Kabupaten Bantul 2 Januari 2012

KTP di Kabupaten Bantul sangat mendukung terlaksananya program E-KTP, sikap yang ditunjukkanpun sangat profesional. Di Kabupaten Bantul Tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah diberi arahan dan teknis lapangan saat pelatihan kabupaten kota se- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang baik serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana dari pegawaipun sangat bagus sehingga menunjang terlaksananya program E-KTP.

Inisiatif dalam pelaksanaan program ini berjalan baik, karena target yang ditetapkan belum mencapai maksimal, maka inisiatif yang diambil oleh Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul untuk mengejar target dengan cara lembur dan memperpanjang waktu pelaksanaannya. Biasanya jam operasi dari jam 7.30 wib sampai 16.00 kini ditambah sampai pukul 21.00 wib.

"Karena target belum tercapai kami di intruksikan oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul dan ketua tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP untuk menambah jam operasi atau kerja"⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara bersama ketua Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul. 21 Januari 2012.

Dalam pelaksanaan program E-KTP sikap pelaksanaan menyangkut kedisiplinan mutlak diperlukan. Kedisiplinan disini termasuk kedisiplinan sumber daya manusia dan kedisiplinan pelaksanaan program ini. Kedisiplinan pelaksanaan program E-KTP di kabupaten Bantul sesuai jadwal yang telah ditentukan dan sudah sesuai prosedur yang tepat. Sejak dicanangkan pada bulan April 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melaksanakan beberapa upaya agar pelaksanaan program E-KTP berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dari sisi sumber daya manusia berkaitan dengan sikap pelaksana, kedisiplinan tetap diutamakan pegawai yang melakukan tugas dalam program E-KTP di rasakan cukup disiplin dalam melaksanakan program ini. Tidak ada pegawai yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh ketua tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP. Namun tidak dapat dipungkiri karena minimnya sumber daya manusia dan panjangnya jam kerja membuat pegawai bekerja sangat keras dan membuat efektifitas terganggu.

Hasil penelitian dilapangan ini kemudian diperkuat dengan data kuesioner yang diajukan 25 responden yang terdiri dari 18

pegawai dan 7 tim pembantu dalam hal ini adalah mahasiswa Akakom Yogyakarta. Terkait sikap pelaksanaan dan pelayanan sebagian besar responden mengatakan telah memberikan pelayanan yang prima kepada wajib E-KTP.

Tabel. 3.14
Sikap Pelayanan Program E-KTP di Dalam Tim di Kabupaten Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	1	4
2.	Baik	15	60
3.	Kurang baik	7	28
4.	Tidak baik	2	8
Jumlah		25	100

Sumber data: hasil penelitian

Berkaca pada hasil ini dapat dilihat sikap pelayanan program E-KTP yang dilakukan oleh tim pelaksanaan dan penanggung jawab E-KTP se-Kabupaten Bantul berjalan baik. Dari 25 responden 15 orang atau 60 % mengatakan sikap pelayanan telah baik. 7 orang atau 28% kurang baik dan sisanya sangat baik dan tidak baik. Siap pelaksanaan oleh tim pelaksanaan dan penanggung jawab E-KTP se-

Kabupaten Bantul dalam upaya melakukan pelayanan perekaman *data base* E-KTP telah baik.

Hal lain dari sikap pelaksanaan adalah pemahaman pegawai atas sikap pelayanan dan tanggung jawab masing-masing tim dalam upaya melakukan pelayanan. Dari hasil kuesioner yang ada pemahaman pegawai terhadap sikap pelayanan dan tanggung jawab masing-masing tim maupun individu baik.

Tabel. 3.15
Pemahaman Tim Atas Sikap Pelaksanaan dan Pelayanan Serta
Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Program E-KTP se-kabupaten
Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	2	8
2.	Baik	18	72
3.	Kurang baik	4	16
4.	Tidak baik	1	4
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil penelitian

Dari hasil ini menunjukkan bahwa, pemahaman pegawai atas sikap pelaksanaan program E-KTP serta tanggung jawab sudah baik.

Dari 25 responden, 18 diantaranya atau 72% memiliki pemahaman yang baik, 4 responden mengatakan kurang baik, sangat baik 2 responden dan tidak baik hanya 1 responden saja. Hasil ini tentunya selaras dengan pengamatan dilapangan, bagaimana terlihat pegawai yang melaksanakan program ini terlihat sangat baik karena walaupun banyak kendala yang dihadapi namun target yang telah ditetapkan hampir tercapai sepenuhnya sesuai yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain pemahaman tim dan pegawai atas sikap pelayanan, pemahaman atas pelayanan yang telah berjalan merupakan indikator sebuah keberhasilan implementasi sebuah program. Berikut hasil kuesioner terhadap pelaksanaan pelayanan program E-KTP.

Tabel 3.16
Pelaksanaan Pelayanan Program E-KTP
Di Kecamatan Se-Kabupaten Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	28
2.	Baik	14	56
3.	Kurang baik	3	12
4.	Tidak baik	1	4
Jumlah		25	100

Sumber data: Hasil penelitian

Dari hasil kuesioner yang ada, 56% responden mengatakan baik pelaksanaan pelayanan E-KTP yang telah berjalan, yang mengatakan sangat baik 28%, sedangkan yang menyatakan kurang baik 12% dan tidak baik 4%. Dari hasil ini terlihat bahwa proses pelayanan dalam upaya implementasi program Nasional E-KTP saat ini di Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik walau pun ada kekurangan didalamnya.

Dalam implementasi sebuah program atau kebijakan, biasanya sikap masyarakat akan sebuah program itu beragam, dalam implementasi program Nasional E-KTP ini sikap masyarakat saat dilayani baik pada waktu masa sosialisasi maupun pada masa

perekaman perekaman *data base* wajib E-KTP, sikap masyarakat sangat variatif. Berikut sikap masyarakat dari hasil kuesioner.

Tabel 3.17
Sikap Masyarakat Saat Proses Implementasi
Program E-KTP di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	28
2.	Baik	14	56
3.	Kurang baik	3	12
4.	Tidak baik	1	4
Jumlah		25	100

Sumber data : Hasil Penelitian

Dari hasil kuesioner ini terlihat bahwa, sikap masyarakat saat proses implementasi baik itu tahapan sosialisasi maupun tahapan perekaman *database* E-KTP bersikap baik. Sebagian besar responden mengatakan sikap masyarakat baik yaitu 56 % atau 14 orang, kemudian sangat baik 28% atau 7 orang serta 12 % kurang baik dan 4% tidak baik. Melihat hasil kuesioner ini tentunya terlihat seperti dilapangan dimana sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bantul bersikap baik atas pelayanan dan program Nasional E-KTP. Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara bersama Ibu Tri sumiarti,SH.

“Dalam beberapa kali kesempatan, kami melihat sikap masyarakat sangat baik atas kehadiran program E-KTP ini selain itu sikap masyarakat juga baik saat kami layani untuk proses perekaman E-KTP”⁵⁸

Hal lain yang menggambarkan adalah respons masyarakat atas kehadiran program atau kebijakan ini. Respons masyarakat atas kehadiran bermacam tergantung dengan kedalaman individu mengetahui informasi yang berkenaan dengan program E-KTP ini. Adapun respon masyarakat terhadap kehadiran E-KTP sebagai berikut;

Table 3.18
Respons Masyarakat atas Kehadiran Program E-KTP
Di Kecamatan se-Kabupaten Bantul

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	6	24
2.	Baik	15	52
3.	Kurang baik	3	12
4.	Tidak baik	1	4
Jumlah		25	100

Sumber data ; Hasil penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, respons masyarakat Kabupaten Bantul secara umum atas kehadiran

⁵⁸ Ibid,

dan pengetahuan program E-KTP adalah baik. Sebagian besar responden atau 52% mengatakan responsnya baik, kemudian sangat baik 24%, kurang baik 12 % serta sisanya tidak baik 4%. Melihat hasil ini tentunya hal ini selaras dengan penelitian di lapangan di mana masyarakat pada umumnya merespon baik atas kehadiran program ini, hal ini juga sama seperti yang diungkapkan Ibu Tri sumiarti,SH dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Sepengetahuan kami tim penanggung jawab dan pengelengara E-KTP, kalau respons masyarakat secara umum sie baik, hal ini terlihat saat kami melakukan sosialisasi dan perekaman data base. Kami lihat rata-rata masyarakat merespon baik karena mereka sudah tau betul mekanisme perekaman E-KTP ini.”⁵⁹

Sikap dalam pelaksana program E-KTP di Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kelancaran. Hal ini karena adanya sikap yang baik dari aparat pelaksana menunjukan komitmen yang besar untuk melaksanakan program ini dengan baik. Bila dilihat dari segi disposisi ini, telah terdapat disiplin yang baik dari setiap aparat yang ada dalam pelaksanaan program E-KTP tahun 2011-2012. Hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki kapasitas dan kompeten serta *skill* dalam bidangnya masing-masing.

⁵⁹ Ibid

Dari hasil wawancara bersama tim teknis penanggung jawab perekaman dan tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP selalu disiplin dan profesional, seluruh anggota tim telah bekerja sesuai peraturan dan porsi masing masing.

“Seluruh anggota Tim pelaksana program E-KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ini telah cukup baik dalam menjalankan tugas yang diberikan, dimana mereka semua telah mengikuti petunjuk maupun aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu diragukan lagi kinerjanya”⁶⁰

4. Struktur Organisasi

Apabila kita membicarakan struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentation. Secara resmi penerapan kebijakan program nasional E-KTP mengacu kepada SOP yang berasal dari pusat. Struktur organisasi-organisasi badan pelaksana yang melaksanakan kebijakan mempunyai peranan penting dalam implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja seperti SOP. SOP ini digunakan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pelaksana program E-KTP agar seragam dan selaras.

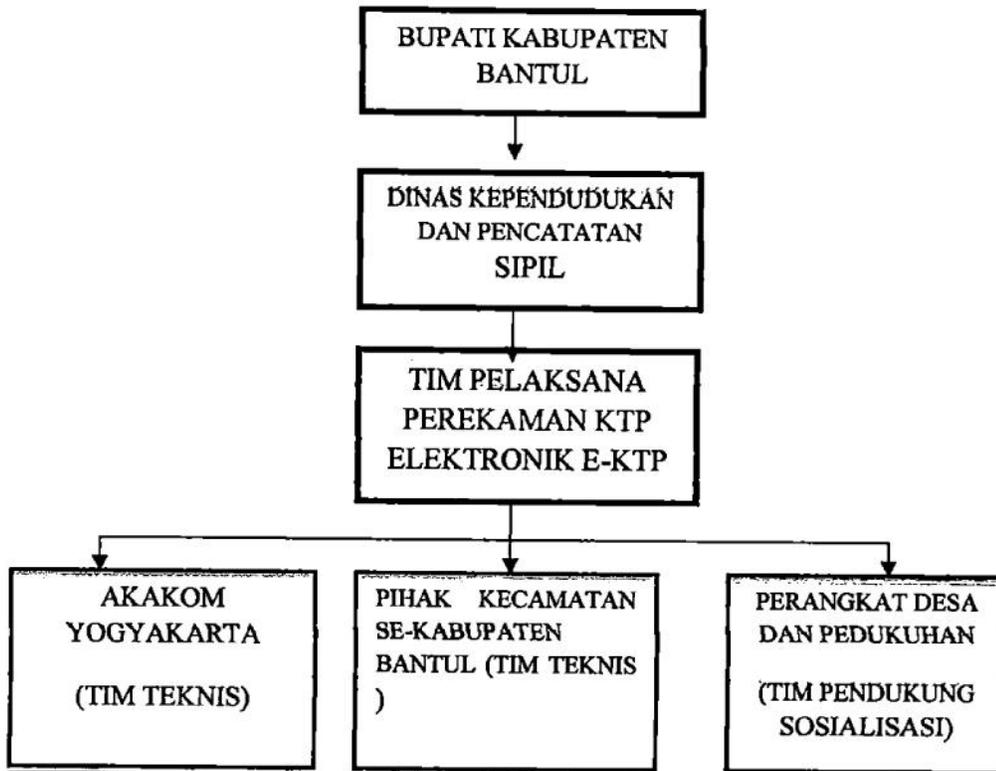
⁶⁰ Ibid 46

Badan pelaksanaan yang mengimplementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tim pelaksana perekaman KTP elektronik E-KTP, Kecamatan se-Kabupaten Bantul, dan AKAKOM Yogyakarta. Salah satu bentuk kerjasama antar lembaga yang terjadi dalam program E-KTP ini adalah adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tim pelaksana perekaman KTP elektronik atau E-KTP serta pihak Kampus AKAKOM Yogyakarta.⁶¹ Berikut alur struktur birokrasi pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Bantul:

⁶¹ Ibid. 4

Gambar 3.3

Alur Struktur Birokrasi Program E-KTP Kabupaten Bantul 2011



(Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Tim pelaksana perekaman KTP elektronik e-KTP, Kabupaten Bantul)

Struktur birokrasi yang ada sudah efisien, tidak *overload* ataupun tumpang tindih tugas. Hal ini karena setiap aparat pelaksana telah mengerti dengan tugasnya masing-masing di mana disetiap struktur birokrasi aparat pelaksanaanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sesuai dengan yang diperintahkan atasan. Hal ini dibuktikan di lapangan dengan adanya

kelancaran program E-KTP walau pun terhambat dengan permasalahan teknis pada alat perekaman. Aparat pelaksanaanya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada.

*“kami telah memberikan arahan kepada tim tenis kecamatan dan adik-adik mahasiswa AKAKOM untuk bekerja sesuai posisi dan porsi masing masing agar semua berjalan seiring seirama”.*⁶²

Alur struktur organisasi yang dipakai dalam implementasi program E-KTP ini berdasarkan peraturan Bupati dan pedoman kestruktur organisasi Pemerintah Daerah. Struktur organisasi yang dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bila dilihat pada prinsip efektifitas dan efisiensi organisasi telah sangat baik (Ramping) tidak tumpang tindih dan berlebihan sehingga inefisiensi. Struktur organisasi dalam hal ini adalah struktur organisasi implementasi program E-KTP di mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tentunya di wakili oleh Bupati Bantul sebagai pihak regulator, Berikutnya turun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana baik regulasi maupun teknis, dalam penerapannya agar lebih efektif kemudian dibentuk kembali satu tim yaitu tim pelaksana dan penanggung jawab program E-KTP.

⁶² Ibid. *Op.cit.* 3

Alur organisasi yang dimulai dari Bupati sampai tim pelaksana berjalan (*vertikal top and down*). Namun struktur Birokrasi juga ditambahkan seperti kepada Birokrasi terbawah yaitu perangkat Desa, Pedukuhan RT,RW dan pelaksana Kaur Desa. Selain itu yang masih masuk dalam tanggung jawab meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pembentukan tim pembantu dari Kampus Akakom Yogyakarta dan beberapa LSM yang konsen bergerak di bidang ini.

Bila melihat hasil dari keseluruhan proses implementasi program Nasional E-KTP di Kabupaten Bantul mulai dengan proses sosialisasi sampai proses perekaman dengan empat indikator atau variabel X yang itu adalah Komunikasi, Sikap pelaksana, Sumber daya serta Struktur organisasi terlihat kinerja pelayanan program E-KTP sudah berjalan dengan baik namun masih masuk katagori standar atau biasa-biasa saja belum menunjuk pada level amat baik. Hal ini sendiri dapat dilihat pada pembahasan diatas dimana target yang telah ditetapkan belum begitu maksimal karen kendala-kedala baik teknis maupun nonteknis.

Namun dari itu semua kaitannya dengan empat indikator ini telah menunjukkan kalau proses indikator variabel X berjalan dengan baik maka kinerja pada variabel Y akan sinkron pula atau berjalan

baik pula. Dari hasil analisis dan penelitian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam upaya mengimplementasi program Nasional E-KTP berjalan dengan baik, namun dengan level biasa-biasa saja.